

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Permukiman

2.1.1 Pengertian Permukiman

Pengertian dasar permukiman dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2011 adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau perdesaan.

Permukiman didalam kamus tata ruang terdiri dari tiga pengertian yaitu:

- a. Bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun kawasan pedesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan
- b. Kawasan yang didominasi kawasan hunian dengan fungsi utama sebagai fungsi tempat tinggal yang dilengkapi dengan prasarana, sarana lingkungan dan tempat kerja yang memberikan pelayanan dan kesempatan kerja terbatas untuk mendukung perikehidupan dan penghidupan sehingga fungsi permukiman tersebut dapat berdaya guna dan berhasil guna.
- c. Tempat atau daerah untuk bertempat tinggal atau tempat untuk menetap.

Permukiman merupakan bagian dari lingkungan hunian yang terdiri dari satu atau lebih satuan perumahan yang mempunyai sarana, prasarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan pedesaan [10]. Lingkungan permukiman sendiri berbeda dengan perumahan karena mencakup segala fasilitas dan kelengkapan untuk memenuhi kebutuhan sosial dan mencari nafkah [13]. Penyelenggaraan kawasan permukiman dilakukan untuk mewujudkan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan kehidupan yang terencana, menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan sesuai dengan rencana tata ruang.

Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal dan tempat kegiatan yang mendukung kehidupan sehari-hari [14]. Lingkungan perumahan dan permukiman kumuh merupakan satu-

kesatuan lingkungan apabila dinilai merupakan lingkungan hunian yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat [15]. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan pedesaan [10].

2.1.2 Faktor Permukiman

Agar terciptanya tertib pembangunan permukiman, terdapat lima faktor utama yang saling berkaitan dan harus dijadikan pokok perhatian yaitu:

- a. Alam, menyangkut tentang pola tata guna lahan, pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam, daya dukung lingkungan serta taman, area rekreasi atau olahraga.
- b. Manusia, antara lain menyangkut tentang pemenuhan kebutuhan fisik atau fisiologis, penciptaan rasa aman dan pelindung, rasa memiliki lingkungan serta tata nilai dan estetika.
- c. Masyarakat, menyangkut tentang partisipasi penduduk, aspek hukum, pola kebudayaan, aspek sosial ekonomi dan kependudukan.
- d. Jaringan prasarana, menyangkut utilitas, transportasi dan komunikasi.

2.1.3 Aspek Permukiman

Suatu permukiman hendaknya mengikuti kriteria bagi permukiman yang baik dengan memenuhi hal-hal berikut:

1. Aspek fisik
 - a. Letak geografis, yaitu aspek yang menentukan keberhasilan dan perkembangan dari suatu kawasan.
 - b. Lingkungan alam dan binaan, yaitu aspek lingkungan alam dan binaan yang akan sangat mempengaruhi kondisi permukiman serta kehidupan didalamnya.
 - c. Sarana dan prasarana lingkungan, yaitu penyediaan sarana dan prasarana akan mendukung kegiatan dan kehidupan masyarakat dalam permukiman tersebut.

2. Aspek non fisik
 - a. Aspek politik yang termasuk kebijakan yang mengatur kawasan permukiman, keberadaan lembaga-lembaga desa dan sebagainya.
 - b. Aspek ekonomi yaitu aspek yang meliputi kegiatan yang berkaitan dengan mata pencaharian masyarakat.
 - c. Aspek sosial yaitu yang meliputi kehidupan sosial masyarakat, bertetangga dan sebagainya.
 - d. Aspek budaya yaitu yang berkaitan dengan kehidupan adat istiadat, kehidupan beragama dan kebiasaan bekerja.

2.2 Permukiman Kumuh

2.2.1 Pengertian Permukiman Kumuh

“Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat” menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia 14/PRT/M/2018 Tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Kawasan kumuh adalah kawasan di mana kondisi rumah sebagai hunian masyarakat di kawasan tersebut tidak sesuai dengan standar yang berlaku, baik standar kebutuhan, kepadatan bangunan, persyaratan rumah sehat, kebutuhan sarana air bersih, sanitasi maupun persyaratan kelengkapan prasarana jalan, ruang terbuka, serta kelengkapan fasilitas sosial lainnya [16]. Kawasan permukiman kumuh adalah lingkungan hunian yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian[9]. Permukiman kumuh didefinisikan juga sebagai tempat tinggal penduduk miskin di pusat kota dan permukiman padat tidak teratur di pinggiran kota dimana penduduk yang bertempat tinggal merupakan penduduk yang umumnya berasal dari para migran luar daerah [17]. Selain itu, sebagian dari permukiman ini adalah permukiman ilegal yang berada pada tanah yang bukan miliknya atau tanpa seizin pemegang hak tanah sehingga disebut permukiman liar [18].

Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan dan permukiman kumuh bertujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan

masyarakat penghuni, dilakukan untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru serta untuk menjaga dan meningkatkan kualitas dan fungsi perumahan dan permukiman. Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh mencakup:

- a. Ketidakteraturan dan kepadatan bangunan yang tinggi;
- b. Ketidaklengkapan prasarana, sarana, dan utilitas umum;
- c. Penurunan kualitas rumah, perumahan dan permukiman, serta prasarana, sarana dan utilitas umum;
- d. Pembangunan rumah, perumahan, dan permukiman yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

2.2.2 Faktor Timbulnya Permukiman Kumuh

Beberapa faktor yang mempengaruhi keberadaan kawasan permukiman kumuh, yaitu faktor urbanisasi, faktor sarana prasarana, faktor sosial ekonomi, faktor tata ruang dan faktor lahan [19]. Perkembangan perumahan dan permukiman dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti ketidakmerataan pembangunan dan ekonomi yang terpusat pada daerah perkotaan sehingga menyebabkan adanya kegiatan migrasi dari desa ke perkotaan maupun sebaliknya [20]. Seiring dengan kebutuhan perumahan yang meningkat, masyarakat secara swadaya memecah bidang tanah untuk membangun tempat tinggal tanpa perencanaan tapak yang baik sehingga bentuk dan tata letak kavling tanah menjadi tidak teratur dan hunian tempat tinggal tidak dilengkapi dengan prasarana dasar permukiman [18].

Faktor utama penyebab adanya permukiman kumuh ada dua. Pertama yaitu pertumbuhan kota yang cukup tinggi dan tidak diimbangi oleh tingkat pendapatan yang cukup. Kedua keterlambatan pemerintah kota dalam merencanakan dan membangun prasarana kota terutama jalan pada daerah permukiman baru.

Beberapa faktor pendorong timbulnya permukiman kumuh ialah arus urbanisasi penduduk, kondisi sosial ekonomi masyarakat, kondisi sosial budaya masyarakat, karakteristik fisik alami [21]. Urbanisasi penduduk yang tinggi di kawasan perkotaan maupun perdesaan berdampak pada peningkatan kebutuhan

akan hunian serta peningkatan harga lahan [22]. Namun, di sisi lain, pemerintah memiliki keterbatasan untuk menyediakan permukiman baru yang terjangkau bagi masyarakat marginal, sehingga para pendatang akan memilih alternatif tinggal di permukiman kumuh untuk mempertahankan kehidupan di kota [23].

Adanya kawasan permukiman kumuh di perkotaan maupun perdesaan yang berkembang telah menjadi masalah serius bagi masyarakat maupun pemerintah. Hal ini disebabkan tingginya tingkat kepadatan penduduk, rendahnya tingkat pendapatan, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, banyaknya penduduk yang bermata pencaharian informal, keterbatasan lahan, dan rendahnya tingkat kepedulian dan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan dan kurangnya partisipasi masyarakat terhadap penataan permukiman kumuh, sehingga Kawasan permukiman yang dibangun tidak memperhatikan aspek penting permukiman yang berimplikasi memberikan gambaran suatu kawasan permukiman yang kumuh [16].

2.2.3 Karakteristik Permukiman Kumuh

Karakteristik permukiman kumuh ditunjukkan dengan kondisi perumahan yang berkepadatan tinggi, unit rumah yang relatif kecil, atap rumah biasanya terbuat dari bahan yang sama dengan dinding. Adapun karakteristik permukiman kumuh yang menonjol adalah kualitas bangunan rumah yang tidak permanen dengan kerapatan bangunan cukup tinggi serta tidak beraturan, prasarana jalan yang kurang baik, tidak adanya saluran drainase, serta tidak adanya sarana pengelolaan persampahan sehingga permukiman terlihat kotor [18]. Menurut hasil penelitian Suparlan (2000) permukiman kumuh memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. kondisi fasilitas umum yang ada dalam kondisi kurang baik atau tidak memadai
2. kondisi hunian perumahan dan permukiman mencerminkan penghuninya kurang mampu atau miskin
3. adanya tingkat frekuensi dan kepadatan bangunan yang tinggi sehingga mencerminkan buruknya tata ruang dan ketidakmampuan ekonomi penghuninya
4. permukiman kumuh merupakan satuan komunitas yang hidup secara terpisah dengan batas-batas kebudayaan dan sosial yang jelas.
5. Permukiman yang mana penghuninya secara ekonomi dan sosial tidak homogen.

6. Sebagian besar penghuni permukiman kumuh adalah masyarakat yang bekerja di sektor informal atau mempunyai mata pencaharian tambahan di sektor informal.

Menurut Basri (2010) tidak semua pada kawasan kumuh dihuni oleh masyarakat miskin, adapun yang mencirikan suatu kawasan dikatakan kumuh dapat dibagi menjadi 2 yaitu:

1. Kawasan tersebut tidak atau kurang terlayani infrastruktur pendukung kawasan seperti jaringan jalan, drainase, saluran limbah dan lainnya sehingga kawasan tersebut cenderung mengalami degradasi.
2. Hunian kawasan tersebut secara kasat mata terlihat tidak layak huni ditandai dengan kurangnya ventilasi maupun pencahayaan, serta kualitas material bangunan yang tidak layak dijadikan sebagai bahan bangunan untuk hunian.

2.2.4 Kriteria Penilaian Kawasan Kumuh

Kegiatan untuk melakukan identifikasi kawasan permukiman kumuh digunakan beberapa kriteria. Penentuan kriteria kawasan permukiman kumuh dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek atau dimensi yang ada seperti kesesuaian peruntukan lokasi dengan rencana tata ruang, status (kepemilikan) tanah, letak/kedudukan lokasi, tingkat kepadatan penduduk, tingkat kepadatan bangunan, kondisi fisik, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat lokal [1].

Kriteria Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh merupakan kriteria yang digunakan untuk menentukan kondisi kekumuhan pada Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Kondisi kekumuhan ditinjau dari beberapa aspek:

1. Kondisi Bangunan Gedung
Adapun kriteria kekumuhan ditinjau dari kondisi bangunan gedung, meliputi:
 - a. Ketidakteraturan bangunan
 - b. Tingkat kepadatan bangunan yang tinggi dan tidak sesuai dengan rencana tata ruang
 - c. Kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat
2. Kondisi Jalan Lingkungan

Adapun kriteria kekumuhan ditinjau dari kondisi jalan lingkungan, meliputi:

- a. Jaringan jalan yang tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman
- b. Kualitas permukaan jalan buruk

3. Kondisi Penyediaan Air Minum

Adapun kriteria kekumuhan ditinjau dari kondisi penyediaan air minum, meliputi:

- a. Akses air minum tidak tersedia
- b. Kebutuhan air minum minimal setiap individu tidak terpenuhi

4. Kondisi Drainase Lingkungan

Adapun kriteria kekumuhan ditinjau dari kondisi drainase lingkungan, meliputi:

- a. Drainase lingkungan yang tidak tersedia
- b. Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan
- c. Kondisi konstruksi drainase buruk

5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah

Adapun kriteria kekumuhan ditinjau dari kondisi pengelolaan air limbah, meliputi:

- a. Sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis
- b. Sarana dan prasarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis

6. Kondisi Pengelolaan Persampahan

Adapun kriteria kekumuhan ditinjau dari kondisi pengelolaan persampahan, meliputi:

- a. Sarana dan prasarana pengelolaan sampah tidak memenuhi persyaratan teknis
- b. Sistem pengelolaan sampah yang tidak memenuhi persyaratan teknis

7. Kondisi Proteksi Kebakaran

Adapun kriteria kekumuhan ditinjau dari proteksi kebakaran, meliputi:

- a. Prasarana proteksi kebakaran tidak tersedia
- b. Sarana proteksi kebakaran tidak tersedia

2.3 Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan identifikasi kawasan kumuh. Setidaknya ada 8 (delapan) penelitian yang berkaitan dengan kawasan kumuh yang berasal dari 8 (delapan) penulis yang berbeda. Secara umum, penelitian-penelitian tersebut membahas tentang identifikasi tingkat kekumuhan di beberapa lokasi yang diukur dari beberapa variabel atau kriteria terkait identifikasi perumahan dan permukiman kumuh dengan metode yang berbeda-beda disetiap penulis. Adapun kesimpulan dari setiap penelitian terdahulu berisikan klasifikasi tingkat kekumuhan disetiap daerah yang menjadi lokasi penelitian yang dilihat dari adanya nilai atau skoring kumuh disetiap variabel dan parameter yang akan diteliti. Adapun dalam penelitian kali ini, akan dibahas lebih lanjut mengenai identifikasi tingkat kekumuhan dimana lokasi yang dipilih belum ditetapkan sebagai lokasi perumahan dan permukiman kumuh, hal ini bertujuan untuk memperoleh data awal yang menunjukkan gambaran awal permukiman kumuh dan mampu menunjukkan klasifikasi tingkat kekumuhan yakni bukan permukiman kumuh, permukiman kumuh ringan, permukiman kumuh sedang dan permukiman kumuh berat yang diukur dengan 7 (tujuh) indikator atau kriteria kumuh. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini.

Penelitian terdahulu untuk referensi penelitian yang sangat dekat dengan kajian penelitian saat ini terdapat tiga penelitian. Adapun untuk penelitian yang pertama adalah “Identifikasi Tingkat Kekumuhan Kawasan Permukiman Teratak Buluh Kabupaten Kampar” yang dilakukan oleh Mashuri pada tahun 2021 yang memiliki tujuan untuk mengidentifikasi dan mengetahui kondisi kekumuhan serta tingkat klasifikasi kekumuhan. Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan terhadap penelitian saya. Persamaannya adalah variabel yang digunakan dalam melakukan penelitian digunakan 7 (tujuh) variabel yang sama yakni kondisi bangunan gedung, kondisi jalan lingkungan, kondisi drainase lingkungan, sistem penyediaan air minum, sistem pengelolaan persampahan, sistem pengelolaan air limbah dan proteksi kebakaran yang mana telah diatur dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2018 [24]. Selain persamaan yang ada dari pendekatan penelitian yakni menggunakan pendekatan kuantitatif dengan bantuan metode skoring.

Penelitian kedua yakni “Identifikasi Tingkat Kekumuhan Permukiman Suku Sawanggantung, Belitung Timur” yang dilakukan oleh Nor Laely Qomariah, dan Andika Saputra pada tahun 2020. Tujuan yang ada di penelitian ini yakni untuk mengetahui kondisi kekumuhan dan mengetahui klasifikasi tingkat kekumuhan dalam 4 klasifikasi yaitu bukan kumuh, kumuh ringan, kumuh sedang dan kumuh berat. Persamaan dari penelitian ini adalah pendekatan dan metode yang digunakan, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dan metode yang digunakan adalah metode skoring atau pembobotan. Hal yang membuat penelitian ini berbeda adalah terkait variabel penelitian yang digunakan, dimana dalam penelitian hanya menggunakan 5 variabel yakni Aspek bangunan gedung, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, dan sistem persampahan. Penelitian menghasilkan identifikasi tingkat kekumuhan kawasan Permukiman Suku Sawanggantung pada kategori kumuh sedang dengan presentase tertinggi atau masalah utama kekumuhan pada kawasan ini adalah rendahnya aspek proteksi kebakaran, aspek kondisi drainase lingkungan dan aspek sistem pengelolaan persampahan.

Penelitian ketiga yakni “Identifikasi Tingkat Kekumuhan Kawasan Bantaran Sungai Ampera Kelurahan Kaibus Kabupaten Sorong Selatan” yang dilakukan oleh Jekson Koterisa, Windy Mononimbar, dan Veery Lahamendu (2018). Tujuan pada penelitian masih sama dengan penelitian-penelitian yang telah dijelaskan diatas yakni bertujuan untuk mengetahui tingkat kekumuhan pada lokasi terkait yang ditetapkan sebagai lokasi penelitian. Persamaan dari penelitian ini adalah variabel yang digunakan yakni 7 (tujuh) variabel terkait kumuh yang telah diatur dalam Peraturan Menteri PUPR No 14 Tahun 2018. Selain persamaan dari segi variabel, persamaan lain yang terdapat yakni metode penelitian yang sama-sama menggunakan metode skoring atau pembobotan. Hasil dari penelitian ini adalah menghasilkan identifikasi tingkat kekumuhan kawasan bantaran sungai Ampera pada kategori kumuh ringan dengan presentase tertinggi atau masalah utama kekumuhan pada kawasan ini adalah rendahnya aspek proteksi kebakaran, aspek kondisi drainase lingkungan dan aspek sistem pengelolaan persampahan. Lebih jelasnya beberapa penelitian terdahulu yang penulis gunakan dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Pendekatan	Metode Analisis	Hasil
Mashuri (2021)	Identifikasi Tingkat Kekumuhan Kawasan Permukiman Teratak Buluh Kabupaten Kampar	Kondisi Bangunan Gedung, Kondisi Jalan Lingkungan, Kondisi Penyediaan Air Minum, Kondisi Drainase Lingkungan, Kondisi Pengolahan Air Limbah, Kondisi Pengolahan Persampahan Dan Kondisi Proteksi Kebakaran.	Kuantitatif dan Kualitatif.	Analisis Deskriptif dan Analisis Skoring	Penelitian ini menghasilkan sebuah hasil yang diantaranya: 1. Hasil penelitian ini menghasilkan identifikasi tingkat kekumuhan kawasan Teratak Buluh pada kategori kumuh ringan. 2. Presentase tertinggi atau masalah utama kekumuhan pada kawasan ini adalah rendahnya aspek proteksi kebakaran dan aspek kondisi pengelolaan persampahan.
Marselly Dwiputri, Nurjannah Hamdani, dan Bambang Perkasa Alam (2020)	Analisis Tingkat Kekumuhan Pada Lokasi Permukiman Di Perkotaan (Studi Kasus : Kampung Rawa Badung, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur)	Kondisi Bangunan Gedung, Kondisi Jalan Lingkungan, Kondisi Penyediaan Air Minum, Kondisi Drainase Lingkungan, Kondisi Pengolahan Air Limbah, Kondisi Pengolahan Persampahan Dan Kondisi Proteksi Kebakaran.	Evaluatif	Analisis SWOT	Penelitian ini menghasilkan sebuah hasil yang diantaranya: 1. Hasil penelitian ini menghasilkan identifikasi tingkat kekumuhan kawasan Kampung Rawa Bandung pada kategori kumuh sedang. 2. Presentase tertinggi atau masalah utama kekumuhan pada kawasan ini adalah rendahnya aspek proteksi kebakaran, aspek kondisi drainase lingkungan dan aspek sistem penyediaan air minum.
Suci Wiarni, Windy Mononimbar dan Suryadi Supardjo (2018)	Analisis Tingkat Kekumuhan Kawasan Permukiman Di Kecamatan Kotamobagu Timur	Kondisi Bangunan Gedung, Kondisi Jalan Lingkungan, Kondisi Penyediaan Air Minum, Kondisi Drainase Lingkungan, Kondisi Pengolahan Air	Kuantitatif deskriptif	Analisis Pembobotan atau skoring	Penelitian ini menghasilkan sebuah hasil yang diantaranya: 1. Hasil penelitian ini menghasilkan identifikasi tingkat kekumuhan Kecamatan

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Pendekatan	Metode Analisis	Hasil
		Limbah, Kondisi Pengolahan Persampahan Dan Kondisi Proteksi Kebakaran.			Kotamagu Timur pada kategori kumuh ringan. 2. Presentase tertinggi atau masalah utama kekumuhan pada kawasan ini adalah rendahnya aspek kondisi drainase lingkungan dan aspek proteksi kebakaran.
Nor Laely Qomariah, dan Andika Saputra (2020)	Identifikasi Tingkat Kekumuhan Permukiman Suku Sawanggantung, Belitung Timur	Aspek bangunan gedung , Penyediaan air minum, Drainase lingkungan, Pengelolaan air limbah, Persampahan.	deskriptif kualitatif.	Analisis Skoring	Penelitian ini menghasilkan sebuah hasil yang diantaranya: 1. Hasil penelitian ini menghasilkan identifikasi tingkat kekumuhan kawasan Permukiman Suku Sawanggantung pada kategori kumuh sedang. 2. Presentase tertinggi atau masalah utama kekumuhan pada kawasan ini adalah rendahnya aspek proteksi kebakaran, aspek kondisi drainase lingkungan dan aspek sistem pengelolaan persampahan.
Jekson Koterisa, Windy Mononimbar, dan Veery Lahamendu (2018)	Identifikasi Tingkat Kekumuhan Kawasan Bantaran Sungai Ampera Kelurahan Kaibus Kabupaten Sorong Selatan	Kondisi Bangunan Gedung, Kondisi Jalan Lingkungan, Kondisi Penyediaan Air Minum, Kondisi Drainase Lingkungan, Kondisi Pengolahan Air Limbah, Kondisi Pengolahan Persampahan Dan Kondisi Proteksi Kebakaran.	kualitatif dan kuantitatif	Kuantitatif dan Pembobotan	Penelitian ini menghasilkan sebuah hasil yang diantaranya: 1. Hasil penelitian ini menghasilkan identifikasi tingkat kekumuhan kawasan bantaran sungai Ampera pada kategori kumuh ringan. 2. Presentase tertinggi atau masalah utama kekumuhan pada kawasan ini adalah rendahnya aspek proteksi kebakaran, aspek

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Pendekatan	Metode Analisis	Hasil
					kondisi drainase lingkungan dan aspek sistem pengelolaan persampahan.
Indah Arry Pratama, Ni Putu Ety Lismaya Dewi (2021)	Identifikasi Tingkat Resiko Kekumuhan di Dusun Kandang Kaoq Kabupaten Lombok Utara	Kondisi Bangunan Gedung, Kondisi Jalan Lingkungan, Kondisi Penyediaan Air Minum, Kondisi Drainase Lingkungan, Kondisi Pengolahan Air Limbah, Kondisi Pengolahan Persampahan Dan Kondisi Proteksi Kebakaran.	Kuantitatif	Analisis Skoring	<p>Penelitian ini menghasilkan sebuah hasil yang diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil penelitian ini menghasilkan identifikasi tingkat kekumuhan kawasan Dusun Kandang Kaoq pada kategori kumuh ringan. 2. Presentase tertinggi atau masalah utama kekumuhan pada kawasan ini adalah rendahnya aspek proteksi kebakaran, aspek kondisi drainase lingkungan dan aspek kondisi jalan lingkungan.
Elpidia Agatha Crysta dan Yanto Budisusanto (2017)	Identifikasi Permukiman Kumuh Berdasarkan Tingkat RT di Kelurahan Seputih Kota Surabaya	Kondisi Bangunan Gedung, Kondisi Jalan Lingkungan, Kondisi Penyediaan Air Minum, Kondisi Drainase Lingkungan, Kondisi Pengolahan Air Limbah, Kondisi Pengolahan Persampahan Dan Kondisi Proteksi Kebakaran.	Kuantitatif	Analisis Skoring	<p>Penelitian ini menghasilkan sebuah hasil yang diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil penelitian ini menghasilkan identifikasi tingkat kekumuhan Kelurahan Seputih Kota Surabaya pada 10 RT dikategorikan kumuh ringan dan 4 RT lainnya masuk kategori tidak kumuh. 2. Presentase tertinggi atau masalah utama kekumuhan pada kawasan ini adalah rendahnya aspek proteksi kebakaran, aspek sistem penyediaan air minum.

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Pendekatan	Metode Analisis	Hasil
Luthfi Parinduri, Abdul Haris Nasution, Marwan Lubis, dan Darlina Tanjung (2021)	Kegiatan Identifikasi Perumahan dan Kawasan Kumuh Desa Bandar Rahmat Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara	Kondisi Bangunan Gedung, Kondisi Jalan Lingkungan, Kondisi Penyediaan Air Minum, Kondisi Drainase Lingkungan, Kondisi Pengolahan Air Limbah, Kondisi Pengolahan Persampahan Dan Kondisi Proteksi Kebakaran.	Kuantitatif	Analisis Skoring	<p>Penelitian ini menghasilkan sebuah hasil yang diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil penelitian ini menghasilkan identifikasi tingkat kekumuhan kawasan Kumuh Desa Bandar Rahmat kategorikan kumuh ringan. 2. Presentase tertinggi atau masalah utama kekumuhan pada kawasan ini adalah rendahnya aspek proteksi kebakaran, aspek drainase lingkungan.